

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021)

Ambrosya Frieria¹ Elisabeth Silaban² Wira Hadi Sugara³ Eko Wahyu Nugrahadi⁴
Muammar Rinaldi⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: ambrosyafrieria11@gmail.com¹

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek yang menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu parameter yang mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Dengan mengkaji pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan belanja pemerintah di suatu wilayah, kita dapat memperbaiki kondisi perekonomian dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak pendapatan primer daerah dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur selama tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini memberikan harapan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan potensi pendapatan primer daerah dan mengalokasikan belanja publik secara lebih akurat melalui kebijakan desentralisasi. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan pada sektor perekonomian setiap kabupaten dan kota untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana perekonomian suatu negara berkembang ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan pendapatan nasional yang mencerminkan peningkatan kapasitas produktif perekonomian dapat disebut juga pertumbuhan ekonomi (Yasin, 2020). Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi ketika output perekonomian meningkat selama periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain teknologi, tenaga kerja, investasi, konsumsi, pendapatan, pengeluaran, dan sumber daya keuangan (Firmansyah et al., 2022). Globalisasi dan hubungan diplomatik antar negara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena saling bergantung satu sama lain, termasuk Indonesia. Ketika suatu negara mengalami bencana atau krisis, maka dampaknya dapat menyebar ke negara lain. Di penghujung tahun 2019, dunia dihadapkan pada bencana berupa mewabahnya suatu penyakit yang berasal dari Wuhan, China, khususnya Covid-19. Sejak kasus pertama muncul di Indonesia, pemerintah langsung merespons dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Maret 2020 hingga Mei 2020. Puncak kedua dalam hal infeksi COVID-19 terjadi pada Mei 2021, sehingga pemerintah Indonesia harus menanggung konsekuensi penerapan kebijakan pembatasan pergerakan kedua pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali yang dikenal dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Penerapan (PPKM). Penerapan PSBB dan PPKM di beberapa wilayah di Indonesia berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat. Sayangnya, tindakan pengendalian ini berdampak besar terhadap perekonomian negara dan masyarakatnya.

COVID-19 memberikan tekanan yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti di tempat lain di dunia, kerusuhan ini bermula dari masalah kesehatan dan kemanusiaan dan kemudian menyebar ke masalah ekonomi. Sayangnya, tindakan cepat pemerintah mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui PSBB tentu akan menurunkan kinerja perekonomian. Kebijakan yang ditujukan untuk memerangi penyebaran COVID-19 telah mengurangi pergerakan dan aktivitas manusia di sektor barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, manufaktur, dan kepercayaan terhadap perekonomian semuanya menurun secara signifikan, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi. Pembatasan aktivitas perekonomian global juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Sarmuji, anggota Komisi XI DPR, menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Memang secara umum Provinsi Jawa Timur selalu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam kondisi normal. Kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.39%, turun dari 5.23% pada tahun 2019. Berikut grafik pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan stabilitas pada tahun 2017 hingga tahun 2021, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2019, peningkatan pertumbuhan ekonomi mencapai 5.53%, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam - 2.33%, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun lalu, yaitu. Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 3.57%. Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa dikatakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan konsep desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengatur urusan daerahnya secara mandiri, termasuk mengatur perekonomian daerah, dengan harapan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Melalui otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai karena pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencakup total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung berdasarkan PDRB dengan menggunakan dasar harga konstan (Putro, 2011).

Kajian Pustaka

Dalam dokumen tersebut Safitri (2016) menjelaskan bahwa dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada tugas untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan potensial di daerahnya, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan awal daerah (PAD). PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, pajak daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, serta sumber PAD lainnya yang sah. PAD juga merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai belanja daerah (Ngurah & Kartika, 2014). Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda antar daerah karena sumber pendapatannya beragam. Apabila pengelolaan pendapatan di setiap daerah dilakukan secara tepat dan konsisten maka PAD pun akan semakin meningkat. Semakin tinggi penerimaan PAD maka pendapatan pemerintah daerah akan

semakin meningkat dan tingkat kemandirian daerah pun semakin meningkat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah (Kusumawati, 2022). Pengeluaran pemerintah, seperti dijelaskan Halim, merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses perencanaan keuangan pada suatu periode akuntansi. Ini termasuk biaya yang digunakan untuk pemeliharaan, yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan masa manfaat, kapasitas, dan kualitas aset. Belanja pemerintah mencakup aspek-aspek seperti belanja modal yang digunakan untuk memperoleh tanah, bangunan, peralatan, dan aset non-fisik (Hasanah & Handayani, 2021). Secara umum, alokasi belanja modal pemerintah bertujuan untuk membangun infrastruktur dan sarana infrastruktur yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi aktivitas perekonomian. Peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan konsekuensi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Putri, 2014).

Belanja pemerintah mencapai puncaknya pada tahun 2019, sedangkan belanja pemerintah mencapai titik terendah pada tahun 2020. Dengan pengelolaan dana pendapatan pokok daerah (PAD) dan belanja pemerintah yang optimal maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan merata (Utami dan Indrajaya), 2019). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Hasanah dan Nur Handayani pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Sumber Pendapatan Daerah dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur” menunjukkan bahwa sumber pendapatan Asal Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, belanja pemerintah mempunyai dampak negatif yang parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika dianalisis secara bersama-sama, pendapatan awal daerah dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2018 (Hasanah & Handayani, 2021).

METODE PENELITIAN

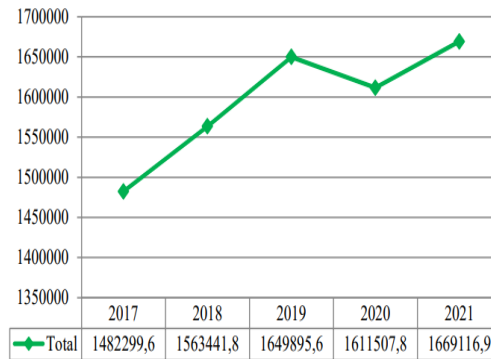
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi secara sistematis, ilmiah dan akurat berdasarkan peristiwa, sifat dan hubungan peristiwa yang diteliti. (Rukajat, 2018). Dalam konteks ini, penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat penelitian. Penelitian juga menggunakan metode kuantitatif, yaitu studi sistematis terhadap suatu fenomena dengan mengumpulkan data terukur menggunakan teknik matematika dan statistik (Ramdhan, 2021). Pendekatan kuantitatif ini membantu menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk angka. Secara keseluruhan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis data dengan menggunakan teknik statistik dan matematika dalam bentuk numerik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan fenomena ekonomi berdasarkan fakta, teori dan observasi serta menarik kesimpulan yang akurat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel terikat (variabel terikat). Variabel bebas yang disebut variabel X mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel terikat karena pengaruhnya. Variabel terikat yang disebut variabel Y merupakan variabel yang dipengaruhi sehingga perubahannya mengikuti variabel bebas.

- Y (Pertumbuhan ekonomi)
- X1 (Pendapatan Asli Daerah)
- X2 (Belanja Pemerintah)

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian literatur sekunder yang bersumber dari buku, majalah dan karya ilmiah. Dan laporan keuangan diperoleh dari sumber

lain sehingga tidak digunakan teknik pengambilan sampel kuesioner. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter.

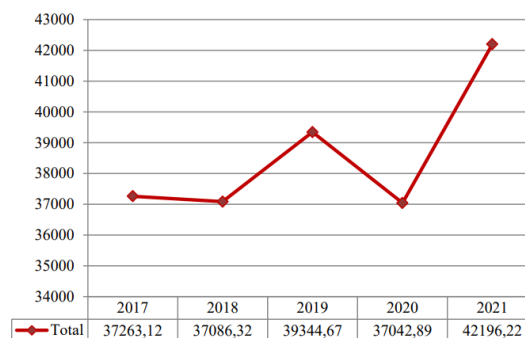
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kondisi pertumbuhan ekonomi



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun stabil dan meningkat setiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi yang berujung pada aksi protes, konflik sosial berskala besar. Pembatasan sosial (PSBB) sehingga aktivitas perekonomian juga ikut terdampak, namun pada tahun 2021 semakin meningkat. PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah tertentu atau total nilai barang dan jasa akhir yang diciptakan oleh seluruh unit ekonomi. PDB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari satu tahun ke tahun berikutnya, atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, misalnya perhitungan PDRB di Provinsi Jawa Timur menggunakan tahun dasar, khususnya tahun 2010.

Kondisi pendapatan asli daerah

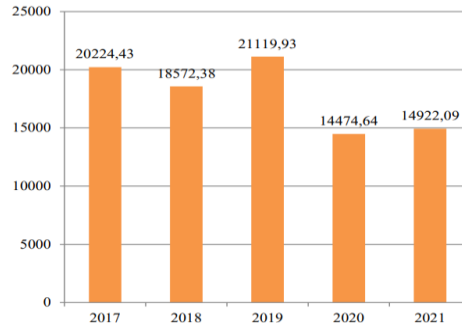


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun sangat fluktuatif. Pendapatan awal daerah pada tahun 2017 sebesar 37.263.12 Miliar, pada tahun 2018 turun menjadi 37.086.32 Miliar Rupiah, pada 2019 meningkat menjadi 39.334.67 Miliar Rupiah, pada tahun 2020 turun signifikan menjadi 37.042.89 Miliar, 2021 naik signifikan menjadi 42.196.22 Miliar

Rupiah. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur terendah pada tahun 2020, sedangkan tertinggi pada tahun 2021.

Kondisi belanja pemerintah



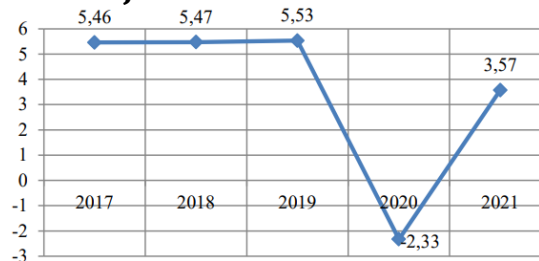
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pelaksanaan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi. Belanja pemerintah pada tahun 2017 sebesar 20.224.43 Miliar, pada tahun 2018 turun menjadi 18.572.38 Miliar Rupiah, pada tahun 2019 meningkat menjadi 21.119. Rp 93 miliar, pada tahun 2020 turun signifikan menjadi 14.474.64 Miliar Rupiah, pada 2021 meningkat menjadi 14.922.09 Miliar Rupiah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemprov Jatim mengeluarkan belanja paling sedikit pada tahun 2020, sedangkan belanja terbanyak pada tahun 2019.

Pembahasan

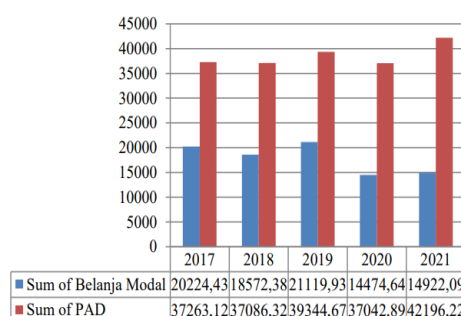
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2017 - 2021



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki pola pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun 2017 hingga 2019, kemudian mengalaih penurunan pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2017 - 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa PAD dan belanja pemerintah mengalami naik turun dengan pola yang sama, hal ini membuktikan bahwa desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Timur berlangsung optimal sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Pada hakekatnya sumber pendapatan daerah adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan utama daerah lainnya yang sah. Dengan adanya PAD, tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengambil pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan prinsip desentralisasi. Secara umum peningkatan PAD diyakini dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu daerah melalui kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah. PAD juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja negara; Ketika tingkat pengeluaran pemerintah tinggi maka dapat mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan daerah (Dewi & Suputra, 2017). Namun tingginya belanja pemerintah tidak selalu efektif dan berdampak pada perekonomian, karena sebagian belanja pemerintah digunakan untuk belanja TI, belanja kendaraan layanan umum, atau belanja pembangunan perkantoran, barang-barang ini tidak terlalu efektif. Belanja investasi merupakan salah satu belanja pemerintah yang penting untuk meningkatkan aset daerah dan menyediakan barang publik yang dapat berdampak langsung terhadap kegiatan pembangunan daerah, sehingga peningkatan belanja perlu difokuskan pada belanja modal dan belanja aset produktif, dan bukan pada peningkatan pegawai atau belanja yang merupakan barang-barang yang tidak penting. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Hasanah, Nur Handayani (2021) dan penelitian Amal dkk (2021), yang menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja sumber daya modal di daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. .

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Subjek	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Daerah	23.077,82	24.425,32	25.484,48	23.263,32	25.257,95
Retribusi Daerah	1.666,17	1.435,95	1.586,78	1.217,77	1.182,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	788,28	820,05	983,83	922,86	1.270,80
Lain-Lain PAD yang Sah	11.730,85	10.405,01	11.289,58	11.638,94	13.231,05
Total PAD	37.263,12	37.086,32	39.344,67	37.042,89	40.942,41

Sumber : Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pajak merupakan faktor penyumbang PAD utama di Jawa Timur, hal ini terkait dengan teori yang dikemukakan Romer bahwa hasil pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi pemerintah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai PAD di Jawa Timur mewakili kinerja pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan masyarakat akan semakin sejahtera. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan pemerintah daerah, maka PDB pemerintah daerah tersebut akan semakin meningkat. Memang pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk membangun dan menumbuhkan perekonomian daerah. Hasil penelitian ini erat kaitannya dengan teori federalisme fiskal yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan hak kepada setiap daerah untuk memanfaatkan sumber daya keuangan (pendapatan) untuk

membayai kebutuhan daerahnya (Qomariyahti & Hermanto, 2017). Teori ini sejalan dengan pandangan Devika Ratih Anggraeni (2020) yang menyatakan bahwa setiap daerah harus mempunyai sumber daya tersendiri yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan agar mampu mengelola perekonomian daerahnya (Anggraeni, 2020). Adanya pendapatan awal daerah (PAD) dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengambil pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan prinsip desentralisasi.

Terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, PAD perlu ditingkatkan karena PAD merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan daerah dan dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus terus ditingkatkan untuk memikul sebagian beban pengeluaran yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat setiap tahunnya untuk mewujudkan hal tersebut, menunjukkan otonomi dan tanggung jawab daerah yang nyata dan luas. Pendapatan primer regional bruto di Provinsi Jawa Timur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Timur karena merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai kegiatan perekonomian di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian, dengan meningkatnya jumlah PAD maka dana masyarakat akan cenderung meningkat dan tingkat kemandirian suatu daerah juga akan semakin kuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan dan belanja fiskal di daerah, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, setiap peningkatan PAD di Jawa Timur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Secara Parsial Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Studi ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, alokasi belanja modal tidak didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana masyarakat, namun digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti biaya pegawai, biaya perjalanan, dan pemeliharaan dinas. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan dapat menurunkannya. Kedua, belanja pemerintah untuk pembangunan tidak selalu digunakan secara langsung oleh semua lapisan sosial dalam perekonomian, misalnya pembelian tanah untuk aset di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk segera dibangunnya infrastruktur.

Alokasi belanja pemerintah untuk penyediaan infrastruktur dan infrastruktur pendukung perekonomian belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, meskipun pada saat yang sama asupan PAD dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan belanja investasi tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengelola dan meningkatkan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dan peralatan sebagai salah satu bentuk aset daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat guna mendukung perekonomian daerah dan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu terdahulu yang dilakukan oleh Ade Rosita Dwi Anwar, M. Faisal Abdullah, Syamsul Hadi (2018), menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi. (Anwar et al., 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Timur 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola PAD sudah optimal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Variabel Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Timur 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola Belanja Pemerintah belum optimal karena hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif, hal ini disebabkan oleh alokasi belanja modal tidak didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk masyarakat akan tetapi digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan bahkan juga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Saran: Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan potensi sumber-sumber penerimaan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengalokasikan belanja modal yang lebih tepat sasaran guna kelancaran tugas pemerintah maupun fasilitas publik seperti pembangunan, infrastruktur dan lain-lain. Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang menjadi faktor penyebab kendala dalam kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pada Pendapatan Asli daerah dan Belanja Pemerintah. Dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan pada Provinsi Jawa Timur. Selain itu pemerintah juga perlu memperhatikan sektor perekonomian di masing masing kabupaten atau kota agar pertumbuhan dapat tercipta secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Y. (2019). *Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur Periode 2010- 2017*. Repository Ub.
- Amal, A., Semmaila, B., & Zakaria, J. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar*. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3),542–551.
- Anggraeni, D. Ratih. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas.Com*, 68(1), 1–12.
- Anisa, B. C. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71–86.
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(3), 863–877.
- Wahyudi. (2020). *Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 103–113.